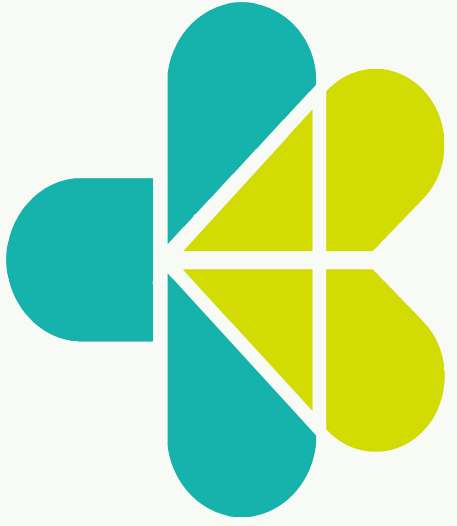


CEGAH POLITISASI *FOGGING* DALAM PENANGGULANGAN DBD!

Policy Brief ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Endemis Demam Berdarah Dengue Di Indonesia

Aryo Ginanjar

Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI & Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKMK Universitas Gadjah Mada



LATAR BELAKANG

Pengasapan insektisida (*fogging*) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh program dalam menanggulangi wabah Demam Berdarah Dengue di masyarakat, namun hanya merupakan penanggulangan sementara (1). *Fogging* saat ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, namun juga oleh swasta, masyarakat maupun pihak tertentu seperti partai politik(2).



Sumber gambar: www.depok.go.id, diakses 25/03/2019

Menjelang momentum politik seperti Pilkada maupun Pemilu dan bersamaan dengan naiknya angka kasus DBD, *fogging* secara mendadak menjadi populer sebagai strategi kampanye dari para elit politik maupun partai politik(3)(4).

Tujuan kajian ini untuk mengungkap fenomena politisasi *fogging* dan dampak negatifnya, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk Dinas Kesehatan sebagai pemangku kebijakan dan pemegang program penanggulangan DBD.

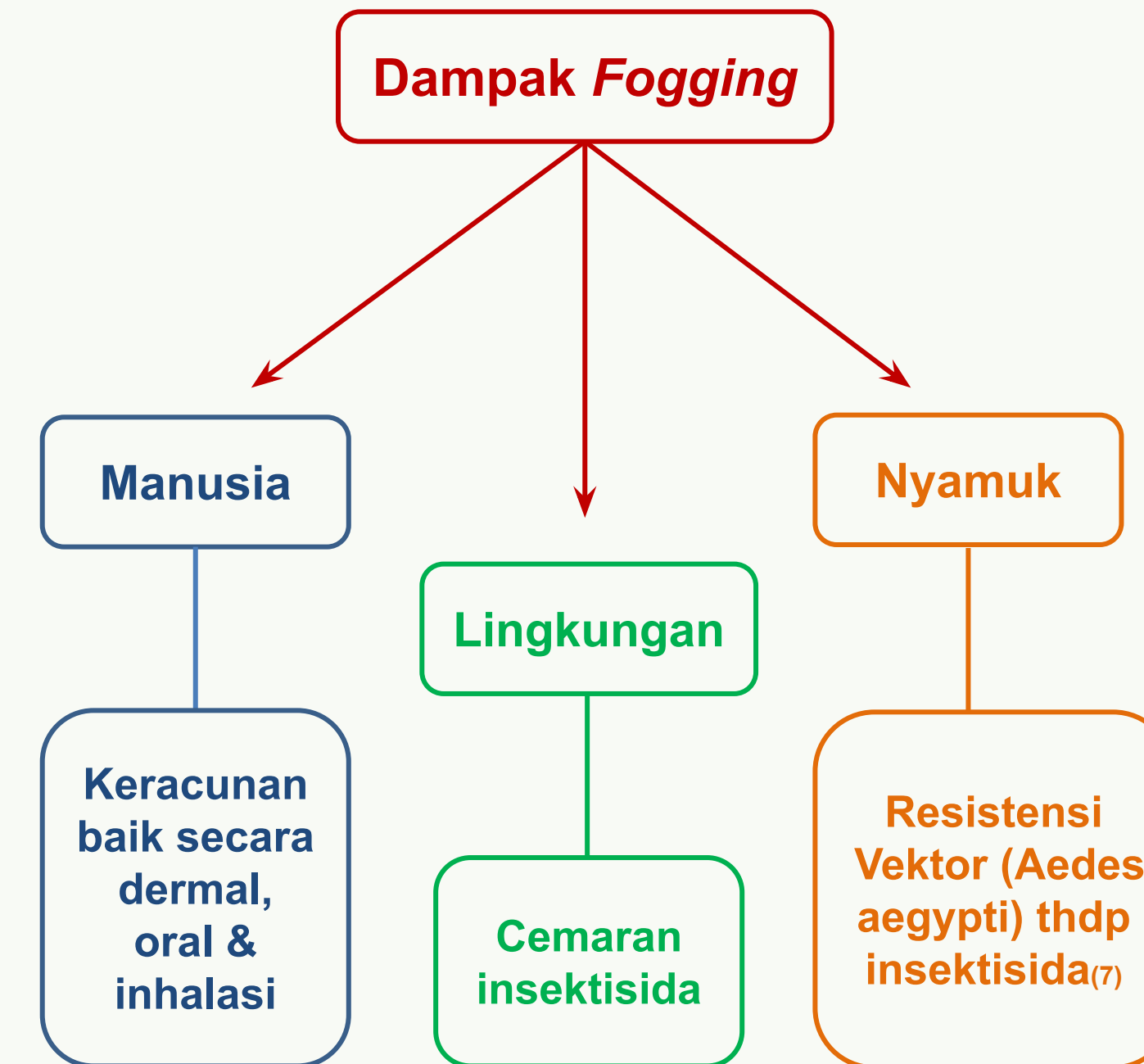
METODE

Kajian ini adalah studi kasus dengan menggali berbagai sumber informasi dan hasil penelitian terkait fenomena politisasi *fogging*, dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL KAJIAN

Fakta-fakta Politisasi Fogging

1. *Fogging* digunakan sebagai alat kampanye untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat(5).
2. Memanfaatkan pemahaman masyarakat yang keliru yang menganggap *fogging* adalah upaya yang ampuh.
3. Pengawasan yang kurang dari Dinas Kesehatan terhadap pihak-pihak lain yang menyelenggarakan *fogging*.
4. *Fogging* yang dilakukan untuk kepentingan politik seringkali tidak melalui penyelidikan epidemiologi dan prosedur yang seharusnya(6).



Prosedur Fogging :

1. Diawali Penyelidikan Epidemiologi.
2. Syarat; ditemukan >3 orang penderita, minimal 5 rumah terkonfirmasi positif jentik, atau terjadi KLB dan kematian.
3. Pelaksanaan *fogging* harus sesuai prosedur dan parameter dalam Buku Pedoman Pengendalian DBD Dirjen P2PL Kemenkes Tahun 2011 dan harus selalu disertai Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang berkelanjutan(8).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang kuat dan tegas untuk mengatur dan melarang upaya *fogging* yang menyalahi prosedur dan hanya digunakan sebagai alat politik (misalnya: Peraturan Daerah dengan sanksi yang jelas dan rasional).
2. Setiap *fogging* harus dilakukan oleh, dan atau sepersetujuan dan pengawasan yang ketat dari Dinas Kesehatan.
3. Program perlu melakukan upaya sosialisasi secara meluas ke masyarakat dan stakeholder mengenai dampak negatif *fogging*, sehingga tidak ada lagi pemahaman yang keliru, serta penekanan kembali bahwa *fogging* harus selalu disertai dengan PSN yang berkelanjutan.

REFERENSI

- (1) Prasetyowati, H. (2016). "Haruskah Fogging?". Buletin Inside, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Vol. XI No. 20, p. 34.
- (2) Rohman, A, Z, F., Afala, L, M. (2017). "Perindo: The Emergence of The Business Party in Indonesia". Jurnal of Advances in Socual Science, Education and Humaniora Research (ASSEHR). Vol. 143, No. 1, p 1-4.
- (3) Susanto, A. (2018). "Strategi Partai Perindo Jelang Pemilu 2019". Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 3, No. 2, p 123-134.
- (4) Wibowo, I. F. (2019). *Fogging DBD Tak Boleh Untuk Kampanye Politik*. <https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/fogging-dbd-tak-boleh-untuk-kampanye-politik/>.
- (5) Simamora, L.Y. (2014). "Strategi Calon Legislatif Kota Pekanbaru Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Umum". Jurnal JOM, Vol. 1, No. 2, p 1-15.
- (6) Pahrevi, Dean. (2019). *Warga Dihimbau Tak Terima Tawaran Fogging Dari Peserta Pemilu*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/28/13030661/warga-dihimbau-tak-terima-tawaran-fogging-dari-peserta-pemilu>.
- (7) Prasetyowati, H. Hendri, J. Wahono. (2016). *The Resistance Status of Aedes aegypti (Linn.) to Organophosphate in Three District Jakarta*. Balaba Journal. Vol.12, No.1, p23-30.
- (8) Kemenkes. (2011). "Pedoman Pengendalian Demam Berdarah Dengue". Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI.